

KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

Abdullah, Sri Mardatillah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to analyze improve of the financial performance local government in Sumatera island period 2012-2016 measured through the calculating the degrees decentralization ratio, dependency ratio, local finance activity ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of harmony and growth ratio. This research used the descriptive approach.

The sample in this research was local government Sumatera island period 2012-2016. Method of data collection had purposive sampling technique. The analysis data using descriptive analysis and trend analysis to saw increase of financial performance.

The result of this study indicate that performance of the financial local government in Sumatera island having an increase seen from degrees decentralization ratio, dependent ratio, local finance activity ratio, the ratio of harmony, and growth expenditure ratio. While the effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth income ratio show fluctuations in the performance of the financial local government in Sumatera island.

Keywords: performance, decentralization, local finance, the ratio of growth, trend analysis

1. Pendahuluan

Di Indonesia perkembangan sektor publik sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah dengan memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan serta menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan

peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan menjadi suatu hal yang penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan. Ini merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Menurut Halim (2012), kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012). Berdasarkan data yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, dapat dilakukan berbagai analisis rasio keuangan, diantaranya rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2016). Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya menjadi tolok ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah, efektivitas, kontribusi masing-masing sumber dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Lebih lanjut Mahmudi (2016), menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD menunjukkan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Rasio ketergantungan menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Sedangkan rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. Sedangkan semakin tinggi nilai rasio efisiensi maka semakin tidak efisien kinerja pemerintah daerah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Untuk rasio keserasian menunjukkan bahwa dengan rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Serta rasio pertumbuhan yang menunjukkan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan dan belanja secara positif ataukah negatif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Dwirandra (2014). Adapun hal yang membedakan yaitu populasi penelitian, dimana populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Selain hal tersebut, peneliti juga menambahkan 2 rasio dari 5 rasio keuangan yang digunakan pada penelitian Fitriani dan Dwirandra (2014) untuk menganalisis kinerja keuangan. Penambahan 2 rasio keuangan berupa rasio derajat

desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan daerah dikarenakan kedua rasio ini penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio derajat desentralisasi ini menunjukkan seberapa besar kemampuan/kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Semakin besar tingkat ketergantungan, maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terjadi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan periode 2012-2016. Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris mengenai peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan periode 2012-2016.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Nataludin (2001) keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Menurut Mamesa dalam Halim (2007), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada pasal 1 ayat 6 PP No.58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan daerah.

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- d. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- e. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
- f. Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan LRA

Pada pasal 1 ayat 7 PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari tiga bagian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LRA merupakan penyajian ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya: a) Pendapatan-LRA; b) belanja; c) transfer; d) surplus/defisit-LRA; e) pembiayaan; dan f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2.4. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut pasal 1 ayat 2 PP Nomor 8 tahun 2006, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas tertentu. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2012).

Analisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan rasio sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2016), Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016) rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}}{\text{Total Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016), rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan transfer pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mahmudi (2016), rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

e. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.

f. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016), analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan keuangan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Selanjutnya analisis belanja modal terhadap total belanja. Menurut Mahmudi (2016), analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

g. Rasio Pertumbuhan

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Mahmudi (2016), analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat diukur dengan rumus berikut.

$$\text{Rasio pertumbuhan pendapatan Th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

Kinerja pendapatan dinilai baik bila pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan negatif, hal ini menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Menurut Mahmudi (2016), analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja mengalami kecenderungan untuk selalu naik.

$$\text{Rasio pertumbuhan belanja operasi Th t} = \frac{\text{Belanja operasi Thn t} - \text{Belanja operasi Thn (t-1)}}{\text{Belanja operasi Thn (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio pertumbuhan belanja modal Th t} = \frac{\text{Belanja modal Thn t} - \text{Belanja modal Thn (t-1)}}{\text{Belanja modal Thn (t-1)}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai belanja modal yang diikuti dengan rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya, bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Selanjutnya jika semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya, bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya.

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah LRA (Laporan Realisasi APBD). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa LRA dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pengamatan dilakukan selama 5 tahun terakhir, sehingga didapatkan gambaran keadaan yang mendekati sebenarnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan cara purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mewakili populasi. Kriterianya adalah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang menyajikan LRA (Laporan Realisasi APBD) di situs www.djpk.depkeu.go.id dari tahun 2012-2016 secara berturut-turut dalam format SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

3.2. Defenisi Operasional Variabel

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran keluaran/hasil kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera dalam rangka penyelenggaraan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

3.3. Motode Analisi Data

Mengumpulkan data penelitian berupa LRA (Laporan Realisasi APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2012-2016 dengan cara: Pertama, menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dengan mengukur rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan, rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Kedua, Dari hasil perhitungan kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tersebut diperoleh nilai rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal. Nilai maksimal dan nilai minimal digunakan untuk melihat Kabupaten/Kota mana saja yang memiliki kinerja tertinggi dan terendah, dan nilai rata-rata digunakan untuk melihat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara umum. Ketiga, Nilai rata-rata dari masing-masing rasio selanjutnya dilakukan analisis trend dengan tahun dasar tahun 2012 untuk melihat peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Keempat, menganalisis dan membahas hasil perhitungan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sesuai dengan indikator yang dijelaskan pada landasan teori. Kelima, menarik kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Gambaran Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera berjumlah 154 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 120 Kabupaten dan 34 Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (DJPK) tahun 2012-2016 yang memenuhi kriteria. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan cara purposive sampling. Dari 154 Kabupaten/Kota yang memiliki kriteria sebagai sampel dan memiliki data lengkap sebanyak 72 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 58 Kabupaten dan 14 Kota. Observasi yang dilakukan atas kabupaten/kota di Pulau Sumatera sebanyak 360 Observasi.

4.2. Statistik Deskriptif

Rasio Derajat Desentralisasi

Statistik deskriptif rasio derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Rasio Derajat Desentralisasi

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Keterangan	
						Daerah Tertinggi	Daerah Terendah
RDD	360	0,011	0,432	0,077	0,058	Kota Batam	Kab.Tulang Bawang Barat

Berdasarkan Tabel 1 yang menunjukkan statistik deskriptif rasio derajat desentralisasi untuk keseluruhan sampel penelitian yaitu 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk periode tahun 2012-2016 sebanyak 360 pengamatan. Pada rasio derajat desentralisasi yang disimbolkan dengan RDD memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,076760 atau 7,67%, standar deviasi 0,058261 atau 5,82%, serta nilai minimum sebesar 0,011224 atau 1,12% dan nilai maksimum 0,432096 atau 43,21%. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) sebesar 0,076760 atau 7,67%, menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam membiayai kegiatan rumah tangganya sendiri selama tahun 2012-2016 termasuk kedalam kategori sangat kurang karena berada di antara 0 sampai dengan 10%.

Pada tahun 2012 dari 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebanyak 2,78% termasuk kategori sedang, 11,11% termasuk kategori kurang dan 86,11% termasuk kategori sangat kurang. Pada tahun 2013 sebanyak 1,39% termasuk kategori cukup, 1,39% termasuk kategori sedang, 11,11% termasuk kategori kurang dan 86,11% termasuk kedalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2014 dari 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebanyak 1,39% termasuk kedalam kategori cukup, 2,78% termasuk kedalam kategori sedang, 25% termasuk kedalam kategori kurang dan 70,83% termasuk kedalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2015 dari 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebanyak 1,39% termasuk kedalam kategori baik, 4,17% termasuk kedalam kategori sedang, 23,16% termasuk kedalam kategori kurang dan 70,83% termasuk kedalam kategori sangat kurang. Sedangkan Pada tahun 2016 sebanyak 1,39% termasuk kedalam kategori cukup, 2,78% termasuk kedalam kategori sedang, 20,83% termasuk kedalam kategori kurang dan 75% termasuk kedalam kategori sangat kurang.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Statistik Deskriptif rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Keterangan	
						Daerah Tertinggi	Daerah Terendah
RKKD	360	0,44	0,99	0,85520	0,10595	Kab. Bengkulu Tengah	Kota Batam

Berdasarkan Tabel 2 yang menunjukkan statistik deskriptif rasio ketergantungan keuangan daerah untuk keseluruhan sampel penelitian yaitu 72 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk periode tahun 2012-2016 sebanyak 360 pengamatan. Pada rasio ketergantungan keuangan daerah yang disimbolkan dengan RKKD memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,85520 atau 85,52%, standar deviasi 0,10595 atau 10,59%, serta nilai minimum sebesar 0,44 atau 44% dan nilai maksimum 0,99 atau 99%. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) sebesar 0,85520 atau 85,52%, menunjukkan bahwa rata-rata ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera terhadap dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi selama tahun 2012-2016 termasuk kedalam kategori sangat tinggi karena berada diatas 50%.

Pada tahun 2012 sebanyak 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera semuanya termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Pada tahun 2013, semuanya masih termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Pada tahun 2014 tidak terjadi perubahan, karena semuanya masih termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Pada tahun 2015 sebanyak 1,39% termasuk kedalam kategori tinggi, dan 96,81% termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Sedangkan Pada tahun 2016 termasuk kedalam kategori sangat tinggi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Statistik deskriptif rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Keterangan	
						Daerah Tertinggi	Daerah Terendah
RKeKD	360	0,012	0,984	0,098	0,099	Kota Batam	Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan Tabel 3 yang menunjukkan statistik deskriptif rasio kemandirian keuangan daerah untuk keseluruhan sampel penelitian yaitu 72 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk periode tahun 2012-2016 sebanyak 360 pengamatan. Pada rasio kemandirian keuangan daerah yang disimbolkan dengan RKeKD memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,097871 atau 9,79%, standar deviasi 0,098873 atau 9,89%, serta nilai minimum sebesar 0,011450 atau 1,14% dan nilai maksimum 0,984543 atau 98,45%. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) sebesar 0,097871

atau 9,79%, menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera selama tahun 2012-2016 termasuk kedalam kategori rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif karena berada antara 0-25%.

Pada tahun 2012, dari 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebanyak 97,22% termasuk kedalam kategori kemandirian keuangan sangat rendah dan termasuk pola hubungan instruktif, dan 2,78% termasuk kedalam kategori rendah dan termasuk pola hubungan konsultif. Pada tahun 2013, sebanyak 97,22% termasuk kedalam kategori kemandirian keuangan sangat rendah dan termasuk pola hubungan instruktif, 1,39% termasuk kedalam kategori rendah dan termasuk pola hubungan konsultif dan 1,39% termasuk kedalam kategori sedang dan termasuk pola hubungan partisipatif. Pada tahun 2014 sebanyak 95,83% termasuk kedalam kategori kemandirian keuangan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, 2,78% termasuk kedalam kategori rendah dengan pola hubungan konsultif dan 1,39% termasuk kedalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Pada tahun 2015, 86,11% termasuk kedalam kategori kemandirian keuangan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, 12,50% termasuk kedalam kategori rendah dan termasuk pola hubungan konsultif dan 1,39% termasuk kedalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 94,44% termasuk kedalam kategori kemandirian keuangan sangat rendah dan termasuk pola hubungan instruktif, dan 4,17% termasuk kedalam kategori rendah dengan pola hubungan konsultif dan 1,39% termasuk kedalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Statistik deskriptif rasio efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Rasio Efektivitas PAD

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Keterangan	
						Daerah Tertinggi	Daerah Terendah
REPAD	360	0,012	0,984	0,097	0,098	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Bireuen

Berdasarkan Tabel 4 yang menunjukkan statistik deskriptif rasio efektivitas PAD untuk keseluruhan sampel penelitian yaitu 72 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk periode tahun 2012-2016 sebanyak 360 pengamatan. Pada rasio efektivitas PAD yang disimbolkan dengan REPAD memiliki rata-rata (mean) sebesar 1,133014 atau 113%, standar deviasi 0,331025 atau 33%, serta nilai minimum sebesar 0,313091 atau 31% dan nilai maksimum 2,379331 atau 238%. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) sebesar 1,133014 atau 113%, yang termasuk kedalam kategori sangat efektif karena lebih dari 100%,

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sesuai kategori persentase rasio efektivitas PAD dan rata-rata per tahun rasio efektivitas PAD untuk 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012, sebanyak 56,94% termasuk kategori sangat efektif, 2,78% termasuk kategori efektif, 13,89% termasuk kategori cukup efektif, 20,83% termasuk kategori kurang efektif dan 5,56% termasuk kategori tidak efektif. Pada tahun 2013 sebanyak 61,11% termasuk kategori sangat efektif, 1,39% termasuk kategori efektif, 12,90% termasuk kategori cukup efektif, 20,83% termasuk kategori kurang efektif dan 4,17% termasuk kategori tidak efektif. Pada tahun 2014 sebanyak 80,56% termasuk kategori sangat efektif, 9,72% termasuk kategori cukup efektif, 6,94% termasuk kategori kurang efektif dan 2,78% termasuk kategori tidak efektif. Pada

tahun 2015 sebanyak 55,56% termasuk kategori sangat efektif, 2,78% termasuk kategori efektif, 15,28% termasuk kategori cukup efektif, 12,50% termasuk kategori kurang efektif dan 13,89% termasuk kategori tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 51,39% termasuk kategori sangat efektif, 26,93% termasuk kategori cukup efektif, 11,11% termasuk kategori kurang efektif dan 11,11% termasuk kategori tidak efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan. Statistik deskriptif rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Keterangan	
						Daerah Tertinggi	Daerah Terendah
REKD	360	0,603	1,781	0,973	0,091	Kota Pekanbaru	Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan Tabel 5 yang menunjukkan statistik deskriptif rasio efisiensi keuangan daerah yang disimbolkan dengan REKD memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,973382 atau 97,34%, standar deviasi 0,091086 atau 9,11%, serta nilai minimum sebesar 0,602562 atau 60,26% dan nilai maksimum 1,781421 atau 178,14%. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) sebesar 0,973382 atau 97,34%, yang termasuk kedalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90-100%, menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera selama tahun 2012-2016 belum mampu untuk mengefisienkan belanja daerah untuk memperoleh pendapatan daerahnya.

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sesuai kategori persentase rasio efisiensi keuangan daerah dan rata-rata per tahun rasio efisiensi keuangan daerah. Pada tahun 2012 sebanyak 15,28% termasuk kategori tidak efisien, 73,61% termasuk kategori kurang efisien, dan 11,11% termasuk kategori cukup efisien. Pada tahun 2013 sebanyak 33,33% termasuk kategori tidak efisien, 62,50% termasuk kategori kurang efisien, 1,39% termasuk kategori cukup efisien dan sebanyak 2,78% termasuk kategori efisien. Pada tahun 2014 sebanyak 18,06% termasuk kategori tidak efisien, 75% termasuk kategori kurang efisien, dan 6,94% termasuk kategori cukup efisien. Pada tahun 2015 sebanyak 45,83% termasuk kategori tidak efisien, 50% termasuk kategori kurang efisien, dan 4,17% termasuk kategori cukup efisien. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 29,17% termasuk kategori tidak efisien, 38,89% termasuk kategori kurang efisien, 27,78% termasuk kategori cukup efisien dan sebanyak 4,17% termasuk kategori efisien.

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal). Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Statistik deskriptif rasio keserasian Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6 yang menunjukkan statistik deskriptif rasio belanja operasi dan belanja modal untuk keseluruhan sampel penelitian yaitu 72 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau

Sumatera untuk periode tahun 2012-2016 sebanyak 360 pengamatan untuk masing-masing rasio. Pada rasio belanja operasi yang disimbolkan dengan RBO memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,754320 atau 75,43%, standar deviasi 0,069374 atau 6,94%, serta nilai minimum sebesar 0,518720 atau 51,87% dan nilai maksimum 0,912925 atau 91,29%. Sedangkan pada rasio belanja modal yang disimbolkan dengan RBM memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,242218 atau 24,22%, standar deviasi 0,068848 atau 6,88%, serta nilai minimum sebesar 0,086035 atau 8,60% dan nilai maksimum 0,465014 atau 46,50%.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Keterangan	
						Daerah Tertinggi	Daerah Terendah
RBO	360	0,518	0,912	0,754	0,069	Kota Banda Aceh	Kabupaten Empat Lawang
RBM	360	0,086	0,465	0,242	0,068	Kota Subulussalam	Kota Banda Aceh

Dilihat dari nilai rata-rata (mean) rasio belanja operasi sebesar 0,754320 atau 75,43%, yang lebih besar dari rata-rata (mean) rasio belanja modal sebesar 0,242218 atau 24,22% menunjukkan bahwa rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera selama tahun 2012-2016 memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi dari pada belanja modal.

Rasio Pertumbuhan

Statistik deskriptif rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Statistik Deskriptif Rasio Pertumbuhan Pendapatan

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Keterangan	
						Daerah Tertinggi	Daerah Terendah
RPP	360	0,00	1,180	0,139	0,106	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan Tabel 12 yang menunjukkan statistik deskriptif rasio pertumbuhan pendapatan untuk keseluruhan sampel penelitian yaitu 72 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk periode tahun 2012-2016 sebanyak 360 pengamatan. Pada rasio pertumbuhan pendapatan yang disimbolkan dengan RPP memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,13974 atau 13,97%, standar deviasi 0,10631 atau 10,63%, serta nilai minimum sebesar 0,00 atau 0,00% dan nilai maksimum 1,18028 atau 118,02%. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) rasio pertumbuhan 13,97% diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera selama tahun 2012-2016 pertumbuhannya positif.

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sesuai pertumbuhan rasio pertumbuhan pendapatan untuk 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 sebanyak 91,67% pertumbuhan rasio pertumbuhan pendapatan positif dan 8,33% pertumbuhannya negative. Pada tahun 2013 sebanyak 97,22% pertumbuhan rasio pertumbuhan pendapatannya positif dan 2,78% pertumbuhannya negatif. Pada tahun 2014 sebanyak 91,67% pertumbuhan rasio pertumbuhan pendapatannya positif dan 8,33% pertumbuhannya negatif. Pada tahun 2015 sebanyak 80,33% pertumbuhan rasio pertumbuhan pendapatannya positif dan 16,67% pertumbuhannya negatif. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 97,22% pertumbuhan rasio pertumbuhan pendapatannya positif dan 2,78% pertumbuhannya negatif.

Rasio Pertumbuhan Belanja

Statistik deskriptif rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Statistik Deskriptif Rasio Pertumbuhan Belanja Modal dan Belanja Operasi

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Keterangan	
						Daerah Tertinggi	Daerah Terendah
RPBO	360	0,00	2,918	0,125	0,135	Kab.Padang Lawas Utara	Kab. Kepulauan Anambas
RPBM	360	0,00	4,021	0,273	0,383	Kab.Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara

Berdasarkan Tabel 8 yang menunjukkan statistik deskriptif rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal untuk keseluruhan sampel penelitian yaitu 72 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk periode tahun 2012-2016 sebanyak 360 pengamatan untuk masing-masing rasio. Pada rasio pertumbuhan belanja operasi yang disimbolkan dengan RPBO memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,125913 atau 12,59%, standar deviasi 0,135255 atau 13,52%, serta nilai minimum sebesar 0,00 atau 0,00% dan nilai maksimum 2,138298 atau 213,82%. Sedangkan pada rasio pertumbuhan belanja modal yang disimbolkan dengan RPBM memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,273982 atau 27,39%, standar deviasi 0,383618 atau 38,36%, serta nilai minimum sebesar 0,00 atau 0,00% dan nilai maksimum 4,0121510 atau 402,15%. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) rasio pertumbuhan belanja operasi sebesar 0,125913 atau 12,59%, yang lebih kecil dari rata-rata (mean) rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 0,273982 atau 27,39% menunjukkan bahwa rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera selama tahun 2012-2016 pertumbuhan belanjanya positif.

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sesuai pertumbuhan rasio pertumbuhan belanja untuk 72 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 sebanyak 54,17% pertumbuhan belanjanya positif dan 45,83% pertumbuhannya negative. Pada tahun 2013 sebanyak 70,83% pertumbuhan belanjanya positif dan 29,17% pertumbuhannya negatif. Pada tahun 2014 sebanyak 50% pertumbuhan belanjanya positif dan 50% pertumbuhannya negative. Pada tahun 2015 sebanyak 40,28% pertumbuhan belanjanya positif dan 59,72% pertumbuhannya negative. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 65,28% pertumbuhan belanjanya positif dan 34,72% pertumbuhannya negative.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan rata-rata rasio pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera periode 2012 – 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 9.Rata-Rata Masing-Masing Rasio Per Tahun

Rasio	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Derajat Desentralisasi	6.06%	6.73%	8.42%	8.78%	8.39%
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	90.30%	90.61%	88.57%	70.75%	87.38%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	7.08%	7.88%	10.15%	13.62%	10.20%
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	113.40%	112.21%	133.51%	105.86%	101.52%
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	95.80%	98.93%	96.87%	101.23%	93.86%
Rasio Belanja Operasi	77.61%	75.35%	74.94%	74.79%	74.46%
Rasio Belanja Modal	22.21%	24.49%	24.92%	24.03%	25.45%
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	12.31%	10.92%	16.76%	11.01%	14.36%
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	11.60%	10.70%	15.00%	15.05%	5.82%
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	19.14%	32.20%	26.09%	15.09%	17.03%

Analisis Trend

Analisis trend angka indeks yang digunakan untuk menilai peningkatan atau penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2012-2016 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 10. Penghitungan Trend Rata-Rata Rasio

Rasio	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Derajat Desentralisasi	100%	111%	139%	145%	138%
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	100%	100%	98%	78%	97%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	100%	111%	143%	192%	144%
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	99%	118%	93%	90%
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	100%	103%	101%	106%	98%
Rasio Belanja Operasi	100%	97%	97%	96%	96%
Rasio Belanja Modal	100%	110%	112%	108%	115%
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	100%	89%	136%	89%	117%
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	100%	92%	129%	130%	50%
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	100%	168%	136%	79%	89%

4.3. Pembahasan

Rasio Derajat Desentralisasi

Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam melaksanakan desentralisasi secara rata-rata masih sangat kurang. Pada tahun 2012, lebih dari setengah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera kinerja keuangannya sangat rendah, begitupun dengan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam kategori sangat kurang merupakan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang mengalami pemekaran wilayah sehingga masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Walaupun begitu, tidak semua daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera kemampuan keuangannya sangat rendah. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang kinerja keuangannya tergolong sedang dan baik, salah satunya adalah Kota Batam.

Berdasarkan hasil analisis trend rata-rata rasio derajat desentralisasi diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera kecenderungannya meningkat dari tahun 2012-2016. Hal ini didukung dengan hasil perhitungan rata-rata rasio derajat desentralisasi selama tahun 2012-2016, yang secara garis besar juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam melaksanakan desentralisasi. Walaupun kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera meningkat, peningkatan tersebut masih termasuk kedalam kategori sangat kurang. Hal ini dikarenakan rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera terhadap dana dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi secara rata-rata masih sangat tinggi. Pada tahun 2012, seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera ketergantungan keuangannya sangat tinggi,

begitupun dengan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera kemampuan keuangannya dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat bergantung bantuan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Padahal Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera merupakan Kabupaten/Kota yang sudah mampu menggali pendapatan asli daerahnya dengan mengelola kekayaan daerah baik dari sektor pajak, sektor retribusi daerah, sektor jasa, industry, perdagangan, ekspor, impor dan sektor lainnya. Beberapa daerah tersebut contohnya adalah Kota Batam, Kota Bandar Lampung, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bintan. Walaupun sudah mampu dalam mengelola kekayaan daerahnya, daerah tersebut masih belum mampu untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi pendapatan transfer yang melebihi 50% dari pendapatan daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam membiayai rumah tangganya sendiri secara rata-rata rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Pada tahun 2012, lebih dari setengah bahkan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera kemandirian keuangannya sangat rendah, begitupun dengan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera belum mampu dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah tanpa bantuan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam kategori kemandirian keuangan sangat rendah merupakan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang mengalami pemekaran wilayah sehingga masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Beberapa Kabupaten/Kota tersebut antara lain adalah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Seluma, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Subulussalam, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Kaur, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (www.kemendagri.go.id).

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan sudah sangat efektif. Pada tahun 2012, hampir setengah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera kinerja keuangan dalam memobilisasi PAD sesuai dengan target sangat efektif, begitupun dengan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera mampu dalam mengelola dan mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah.

Kabupaten/Kota yang termasuk kategori sangat efektif merupakan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dan dikelola dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sangat tinggi bila dibandingkan dengan target penerimaan PAD. Sedangkan Kabupaten/Kota yang

termasuk kategori efektif merupakan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang realisasi pendapatan asli daerahnya setara dengan target penerimaan PAD.

Berdasarkan hasil analisis trend rata-rata rasio efektivitas PAD diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera kecenderungannya fluktuatif. Hal ini didukung dengan hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas PAD selama tahun 2012-2016, yang juga mengalami fluktuasi. Dilihat dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Walaupun kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera fluktuasi, efektivitas dalam mencapai target pendapatan asli daerah masih sangat efektif. Hal ini dikarenakan persentase dari rasio efektivitas PAD yang setiap tahunnya termasuk kedalam kategori sangat efektif, walaupun persentasenya fluktuatif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam mengefisiensikan belanja daerah daerah untuk memperoleh pendapatan kurang efisien. Pada tahun 2012, lebih dari setengah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera kinerja keuangannya dalam mengefisiensikan belanja kurang efisien, begitupun dengan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera belum mampu dalam menyeimbangkan antara belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diterimanya.

Kabupaten/Kota yang termasuk kategori efisien merupakan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang sudah mampu dalam menyeimbangkan antara belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diterima. Sedangkan Kabupaten/Kota yang termasuk kategori cukup efisien merupakan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang sudah mampu dalam menyeimbangkan antara belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diterima, namun belanja untuk memperoleh pendapatan tersebut masih cukup besar. Lain halnya dengan Kabupaten/Kota yang termasuk kategori kurang efisien dan tidak efisien merupakan Kabupaten/Kota yang belum mampu dalam menyeimbangkan antara belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diterima, dikarenakan belanja untuk memperoleh pendapatan tersebut sangat besar bahkan lebih besar dari pendapatan yang diterimanya.

Rasio Keserasian

Berdasarkan hasil analisis trend rasio keserasian diketahui bahwa rasio keserasian Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera keserasiannya baik dilihat dari perbandingan antara trend rata-rata rasio belanja operasi semakin menurun dan trend rata-rata rasio belanja modal yang secara garis besar juga meningkat selama tahun 2012-2016, hal ini didukung dengan perhitungan rasio keserasian selama tahun 2012-2016 keserasiannya juga baik, karena dari tahun 2012-2016 rata-rata rasio belanja operasi semakin menurun dari tahun ke tahun diikuti dengan semakin meningkatnya rata-rata rasio belanja modal dari tahun ke tahun.

Selain itu, hal tersebut juga signifikan dengan jumlah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang keserasian antara belanja operasi dan belanja modalnya baik yaitu sebanyak 37 Kabupaten/Kota atau 51,39% sedangkan 35 Kabupaten/Kota keserasiannya kurang baik atau sebesar 48,61%. Dilihat dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam memprioritaskan belanja daerahnya baik. Hal ini berarti porsi belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal daripada dalam bentuk belanja operasi yang sifatnya jangka pendek. Persentase belanja modal diusahakan selalu meningkat karena akan menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Rasio Pertumbuhan

Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam meningkatkan pendapatan daerahnya sudah baik. Pada tahun 2012, lebih dari setengah bahkan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pertumbuhan pendapatannya positif, begitupun dengan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Namun dari hasil analisis trend rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan kecenderungannya fluktuatif. Rasio pertumbuhan pendapatan yang pertumbuhannya positif namun trend rasio pertumbuhannya fluktuatif, artinya kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam mengelola pendapatan tidak cukup baik, karena tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari periode satu ke periode berikutnya.

Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam mempertahankan dan meningkatkan belanja modalnya sudah baik. Pada tahun 2012, lebih dari setengah bahkan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pertumbuhan belanjanya positif, begitupun dengan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terjadi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, yang menggunakan 7 rasio yaitu: rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio derajat desentralisasi mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio efektivitas PAD mengalami fluktuasi. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah mengalami fluktuasi dan kurang efisien. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio keserasian mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi. Namun jika dilihat dari rasio pertumbuhan belanja, terjadi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera..

References

- Abdullah, Asmawanti, D., & Febriansyah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu* Vol.3 No.1.
- Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (edisi Ketiga). (2016). UPP STIM YKPN.
- Antari, & Gusti, A. (2016). Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi* , Vol. 7 No.2.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bisma, Gede, I. D., Susanto, & Hery. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Ganec Suara Edisi Khusus*, Vol 4 No.3.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*.
- Fitriani, & Dwirandra. (n.d.). Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Adayana* Vol.8.1, 211–227.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Kamaroellah, A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. 14 No. 1 Januari-Juni 2017.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Merdeka.com. (2014). Jawa dan Sumatera masih jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Merdeka.Com*. <https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/uang/jawa-dan-sumatera-masih-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-nasional.html>
- Natalia, Listiyani, & Astuti, T. D. (2015). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Sosio-Humaniora*, Vol. 6 No. 1. Tahun 2015.
- Nataluddin. (2001). Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi. UPP STIM YKPN.
- Nordiawan, Deddi, & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Salemba Empat.
- Okezone.com. (2016). “Sumatera, harapan kedua ekonomi Indonesia setelah pulau jawa.” *Okezone.Com*. <https://economy.okezone.com/read/2016/08/11/20/1461424/sumatera-harapan-kedua-ekonomi-indonesia-setelah-pulau-jawa>
- Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi ketiga). (2012). UPP STIM YKPN.
- PERMENDAGRI. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP RI. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP RI. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- PP RI. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahmawati, N. ., & Putra, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2016. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.3, 1767–1795.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Rudiyanto. (2015). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten). Universitas Diponegoro.
- Sartika, D., & Abdullah. (2011). APBD Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2 No. 3, 238–255.
- Sijabat, Saleh, & Wachid. (2013). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2, 236–242.
- Sindonews.com. (2017). “Pulau jawa dan sumatera sumbang terbesar pertumbuhan ekonomi RI.” *Sindonews.Com*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1227923/33/pulau-jawa-dan-sumatera-sumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi-ri-1502097307>
- Suwanda, D. (2015). *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. PPM.
- Ulum, I., & Juanda, A. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Aditya Media Publishing.
- UU RI. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Vurry, A. N. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, Vol 2, No 1. www.djpk.depkeu.go.id. www.kemendagri.go.id.
- Zalyra. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.